

Crowdfunding Untuk Membangun Usaha yang Berkualitas

Dayita Patna,

STMIK Primakara, Jln Tukad Badung no. 135 Denpasar

E-mail: satwika@primakara.ac.id

Abstrak

Media informasi mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut juga didukung dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Dalam membangun usaha kita harus mampu untuk mengikuti perkembangan ilmu bisnis masa kini. Salah satunya adalah dalam memperoleh dana atau mendapatkan modal untuk menunjang bisnis yang sedang dibangun. Media informasi yang banyak digunakan untuk menunjang hal tersebut yaitu situs web. Banyak para wirausahawan yang memanfaatkan jasa perbankan untuk mencari modal usaha. Namun sekarang para usahawan sudah mulai menggunakan cara modern untuk mendapatkan modal yakni Situs Crowdfunding yang merupakan alternative bagi para usahawan untuk mencari dana guna memulai usaha yang mereka miliki. Dari situs ini para usaha mengembangkan usahanya dengan memperoleh modal usaha. Di Indonesia, situs crowdfunding sudah mulai bermunculan seperti kitabisa.com, wujudkan.com, ayopeduli.com, patungan.net, gagas.web.id, bursaide.com dan tedung.com. Dengan adanya situs ini maka para usahawan dapat mengubah pandangan mereka mengenai bagaimana untuk memperoleh modal awal bagi usaha yang mereka jalankan. Dengan adanya situs crowdfunding ini diharapkan para usahawan mampu untuk membangun usaha yang berkualitas serta dapat mengikuti perkembangan dunia bisnis berbasis teknologi informasi.

Kata kunci : *Crowdfunding, modal, wirausahawan.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan milik desa pakraman yang bertempat di wilayah desa pakraman. LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan desa pakraman yang menjalankan fungsi keuangan desa pakraman untuk mengelola potensi keuangan desa pakraman. Berdasarkan penjelasan Perda No. 2 tahun 1988 dan No. 8 tahun 2002 mengenai LPD, adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, dan untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama dari LPD yang mengandung resiko paling tinggi dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan dari LPD selaku kreditor. Agar kegiatan perkreditan antara pihak LPD dengan nasabah lancar, pihak LPD perlu menilai dan menentukan calon nasabah terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan untuk menerima atau menolak

permintaan kreditnya. Hal ini dilakukan mengingat resiko tidak tertagihnya kredit cukup besar. Jadi seorang nasabah harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pihak LPD untuk bisa mendapatkan kredit. Tentu hal ini yang dituntut adalah pihak LPD untuk dapat mengambil keputusan dengan cepat dan cermat mengingat lingkungan bisnis perbankan yang semakin kompetitif.

LPD desa Pakraman Padang Sambian merupakan salah satu LPD yang ada di Bali yang sudah berdiri sejak februari tahun 1990 dengan berpedoman pada Perda Provinsi Bali Tingkat I Bali No 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Selain menerima dan menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk keuangan tabungan dan deposito, LPD desa Pakraman Padangsambian juga menyediakan layanan pemberian kredit kepada masyarakat desa pakraman. Walaupun hanya memberikan fasilitas layanan kredit pada desa pakraman, selama ini masih banyak ditemui kredit macet oleh debitur pada LPD desa pakraman Padangsambian. Hal ini tentu mempengaruhi kelancaran aktivitas LPD itu sendiri. Karenanya diperlukan waktu yang cukup lama dalam menangani kasus kredit macet tersebut.

Selama ini persetujuan pngajuan kredit pada LPD desa pakraman Padangsambian dilakukan secara manual dan belum terstruktur yaitu hanya menganalisa jaminan yang diberikan oleh calon debitur dengan perhitungan nilai jaminan 60% dari jumlah kredit yang diajukan.

Hal ini tentu dianggap kurang dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet. Maka dari itu peranan teknologi informasi sangat diperlukan untuk menunjang keputusan menentukan calon debitur yang layak atau tidak menerima kredit untuk mengurangi resiko terjadinya kredit macet tersebut. Selain itu dengan adanya sebuah sistem pendukung keputusan (SPK) yang dapat membantu kepala LPD dan bagian kredit dalam membuat keputusan, tentu juga dapat meningkatkan dalam pengolahan data, mempercepat prosesnya dan dapat meningkatkan mutu serta pelayanan dari pihak LPD dalam memberikan kredit.

Salah satu metode SPK yang dapat digunakan untuk sistem pendukung keputusan adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP dapat digunakan dalam memecahkan berbagai masalah diantaranya mengalokasikan sumber daya, analisis keputusan manfaat atau biaya, menentukan peringkat atau beberapa alternative, melaksanakan perencanaan ke masa depan yang diproyeksikan dan menetapkan prioritas pengembangan suatu unit usaha.

Perbedaan metode AHP dengan metode SPK lainnya yaitu terletak pada jenis inputnya. Model-model yang sudah ada pada umumnya memakai input kuantitatif atau berasal dari data sekunder. Otomatis model tersebut hanya dapat mengolah hal-hal kuantitatif pula. Dilihat dari permasalahan yang ada pada LPD desa Pakraman Padangsambian ini untuk menentukan pemberian kredit pada calon debitur yaitu kebanyakan berpatokan dengan pengolahan data kualitatif yang berupa informasi tentu hal ini menyulitkan penilaian karena tidak adanya perhitungan yang relevan. Sehingga diperlukan metode yang dapat mengubah data kualitatif ke data kuantitatif untuk mempermudah perhitungan secara matematis. Hal inilah yang merupakan keistimewaan dari metode AHP yang dapat merubah nilai-nilai kualitatif menjadi kuantitatif, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih objektif. Dimana AHP yang merupakan salah satu bentuk model SPK yaitu multiple criteria yang sesuai dengan banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pengeluaran kredit dan keandalannya yang dapat melakukan analisis secara simultan & terintegrasi antara parameter-parameter yang kualitatif maupun kuantitatif.

Maka dari itu metode AHP dirasa cocok untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan kendala perusahaan. Dan yang memudahkan lagi adalah peralatan utama AHP yaitu sebuah hirarki fungsional dengan input utama persepsi manusia yang juga merupakan target utama LPD dalam menentukan calon debitur yang dianggap layak

diberikan kredit atau tidak. Masalah tersebut tergolong masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Hal itulah yang kemudian dipecah kedalam kelompok-kelompoknya menjadi suatu bentuk hirarki.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis memilih judul “Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah dengan Metode Analytic Hierarchy Process (Studi Kasus di LPD desa Pakraman Padangsambian).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana hasil analisa dengan metode AHP dapat mendukung keputusan kelayakan pemberian kredit pada nasabah? Dan bagaimana membuat rancang bangun sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (Studi kasus di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Padangsambian)?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui apakah metode AHP dapat digunakan untuk menentukan kelayakan kredit pada nasabah dan terciptanya sistem yang terkomputerisasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan atas kelayakan pemberian kredit pada nasabah agar lebih efisien dan untuk membantu kemajuan LPD Desa Pakraman Padangsambian dengan dukungan metode *Analytic Hierarchy Process*.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belakangan ini banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak atau kalangan, terutama yang menyangkut masyarakat desa Pakraman sebagai pemilik, Pemerintah pusat maupun daerah, pengurus dan karyawan termasuk akademisi, hal ini berarti LPD memiliki daya tarik atau sesuatu yang menyebabkan pihak-pihak tersebut tertarik dan bahkan berkepentingan terhadap keberadaan LPD.

2.2 Sistem Pendukung Keputusan

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis pada hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang tepat (Suryadi, 1998). Pada sisi lain, pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada kerumitan dan lingkup

pengambilan keputusan dengan data yang begitu banyak. Untuk kepentingan itu, sebagian besar pembuat keputusan dengan mempertimbangkan rasio manfaat atau biaya, dihadapkan pada suatu keharusan untuk mengandalkan seperangkat sistem yang mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif yang kemudian disebut sistem pendukung keputusan (SPK).

2.3 Metode Analytic Hierarchy Process (AHP)

Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan teori umum mengenai pengukuran. Empat macam skala pengukuran yang biasanya digunakan secara berurutan adalah skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Skala yang lebih tinggi dapat dikategorikan menjadi skala yang lebih rendah, namun tidak sebaliknya. Pendapatan perbulan yang berskala rasio dapat dikategorikan mejadi tingkat pendapatan yang berskala ordinal atau kategori (tinggi, menengah,rendah) yang berskala nominal. Sebaliknya jika pada saat dilakukan pengukuran data yang diperoleh adalah kategori atau ordinal, data yang berskala lebih tinggi tidak dapat diperoleh. AHP mengatasi sebagian permasalahan itu. (Saaty, 2001) AHP digunakan untuk menurunkan skala rasio dari beberapa perbandingan berpasangan yang bersifat diskrit maupun berkelanjutan. Perbandingan berpasangan tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran actual maupun pengukuran relative dari derajat kesukaan, atau kepentingan. Dengan demikian metode ini sangat berguna untuk membantu mendapatkan skala rasio dari hal-hal yang semula sulit diukur seperti pendapat, perasaan, prilaku dan kepercayaan.

2.4 WATERFALL

Menurut Pressman (2010), model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering disebut dengan “classic life cycle” atau model waterfall. Model ini termasuk kedalam model generic pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai didalam Software Engineering (SE). Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan.

2.5 Perancangan Sistem

Menurut Jogiyanto (2005) perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut:

1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem,
2. Pendefinisian dari kebutuhan – kebutuhan fungsional,
3. Persiapan untuk rancangan bangun implementasi,
4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk,
5. Yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi,
6. Termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen – komponen perangkat lunak dan perangkat keras dar suatu sistem.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Instrument Penelitian

Agar program ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan peralatan pendukung dengan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

1. Perangkat keras yang digunakan adalah :
 - a. Processore Intel Core i3
 - b. Memory RAM 2 GB
 - c. HDD 500 GB
2. Perangkat lunak yang digunakan adalah :
 - a. Sistem Operasi : Windows 10
 - b. Bahasa Pemrograman PHP
 - c. Aplikasi Adobe Dreamweaver
 - d. Database MySQL

3.2 Alur Penelitian

Alur penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) waterfall. Menurut Kadir (2003) System Development Life Cycle (SDLC) merupakan metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Tahapan SDLC dengan metode waterfall yang meliputi permulaan sistem, analisa sistem , perancangan sistem, implemetasi dan pengujian (Zuriati, 2012). Dengan menggunakan metode ini, setiap tahap dari penelitian akan lebih terkontrol secara sistematis.

1. Permulaan Sistem

Fase permulaan sistem dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau menyelesaikan masalah yang ada dengan membaca lingkungan atau proses bisnis yang berjalan. Langkah kedua yaitu menentukan ruang lingkup yang akan dibangun dan juga menentukan untuk apa dan untuk siapa sistem ini dibangun.

2. Analisa Sistem

Area bisnis (lingkup proyek yang didefinisikan selama permulaan sistem) dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Analisis sistem merupakan studi domain masalah bisnis untuk merekomendasi perbaikan dan menspesifikasi persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi.

Tahapan ini diuraikan beberapa hal, yaitu:

- Gambaran umum LPD desa pakraman Padangsembian seperti profil, visi, misi dan struktur organisasi.
- Menganalisis sistem yang berjalan pada LPD desa pakraman Padangsembian.
- Menganalisis pemecahan masalah dengan menguraikan usulan solusi dari permasalahan sistem yang berjalan.

3. Perancangan Sistem

Dalam fase perancangan sistem, dilakukan beberapa tahapan yaitu:

- Merancang model sistem pendukung keputusan yaitu dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Kriteria dalam menentukan penilaian kelayakan pemberian kredit pada nasabah diperoleh melalui metode wawancara dengan ketua bagian kredit LPD desa pakraman Padangsembian.
- Merancang diagram konteks.
- Merancang Data Flow Diagram
- Merancang PSPEC
- Merancang Kamus Data
- Merancang database sistem pendukung keputusan.
- Merancang Graphic User Interface (GUI) sistem pendukung keputusan.

4. Implementasi

Pada tahapan ini, sistem informasi yang telah dirancang, kemudian diimplementasikan dengan membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk membuat database.

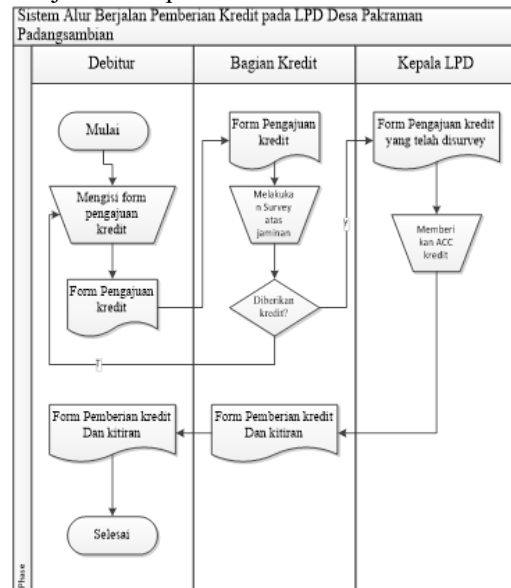
5. Pengujian

Pada tahapan ini, setelah implementasi selesai maka dilakukan pengujian sistem dengan black box testing.

3.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan, bahwa sistem pemberian kredit masih menggunakan cara yang manual. Hal ini dapat dilihat dari proses yang berjalan di LPD Desa Pakraman Padangsembian yang ada dan masih

saat ini dilakukan yaitu pengisian formulir permohonan kredit, dan selanjutnya disurvei tempat tinggal dan jaminan dari debitur. Baru selanjutnya ditentukan kelayakan pemberian kredit. Oleh bagian kredit, yang selanjutnya disetujui oleh kepala LPD.



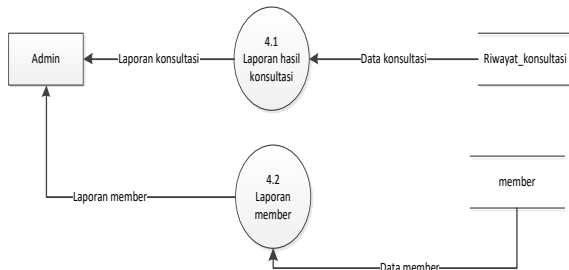
Gambar 4.2 Flowchart sistem alur berjalan Pemberian suatu kredit kepada debitur yaitu dimulai dari debitur mengajukan form permohonan kredit kepada bagian kredit. Kemudian setelah form pengajuan kredit diterima, maka bagian kredit melakukan survey ke rumah debitur dan mengecek jaminan yang diberikan oleh debitur. Apabila jumlah pinjaman sesuai dengan perhitungan oleh jaminan yang diberikan, maka permohonan kredit disetujui, yang selanjutnya di setujui / ditandatangani oleh kepala LPD. Apabila jumlah pengajuan pinjaman dengan jaminan yang diberikan tidak sesuai maka debitur dapat mengajukan kembali permohonan kredit dengan jaminan yang lain, apabila tidak maka permohonan tidak dapat diberikan atau disetujui.

3.4 Perancangan/Desain Sistem (system design)

1. Diagram Konteks

Diagram konteks untuk sistem pendukung keputusan ini terdapat dua entitas yang terlibat didalamnya yaitu, Bagian Admin dan member. Dimana masing-masing entitas dapat memberikan input atau output dari proses sistem tersebut maupun sebaliknya.

4.8 berikut merupakan hasil perancangan dari DFD level 1 proses pelaporan yang menggambarkan bahwa, didalam sistem pendukung keputusan ini, pada bagian proses pelaporannya terdapat dua proses yang ditangani, yaitu Pelaporan Member dan Pelaporan Hasil Konsultasi. Data-data yang digunakan dalam proses pelaporan ini didapat dari data-data yang telah tersimpan didalam tabel-tabel yang ada didalam database yang terdiri dari tabel member dan tabel riwayat konsultasi.



Gambar 4. 8 DFD level 1 Pelaporan

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode Analytical Hierarchy Process dapat diterapkan dalam menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah dengan menggunakan kriteria pekerjaan, penghasilan, jaminan, tanggungan dan status rumah. Pengambilan keputusan dengan menambahkan masing-masing empat subkriteria sehingga mendapatkan hasil akhir yang direkomendasikan layak atau tidak layak menerima kredit pinjaman.
2. Sistem pendukung keputusan yang dirancang menggunakan PHP dapat menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah, sehingga apabila diaplikasikan di LPD tentu akan membantu kinerja dari LPD itu sendiri, karena pengujian dengan metode telah dapat diterima LPD dan mendekati bobot standar penentuan kelayakan kredit pada LPD desa pakraman Padangsambian.
3. Dengan rancangan sistem yang dibuat, dianggap mampu untuk memudahkan pihak LPD dalam pertimbangan pemberian kredit kepada nasabah.

4.2 Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka beberapa hal yang disarankan kepada semua pihak yang membaca skripsi ini yaitu:

1. Sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit ini diharapkan lebih dikembangkan kedepannya tidak hanya menggunakan metode Analytical Hierarchy Process
2. Pengembangan keputusan inidapat lebih dikembangkan tidak hanya pada kelayakan pemberian kredit pinjaman saja.
3. Dalam menerapkan sistem secara terkomputerisasi, sebaiknya dilakukan pemeliharaan sistem secara berkala, serta pengembangan sistem ke dalam bentuk yang lebih modern lagi, missal pengaplikasian ke android.

Daftar Pustaka

- [1] Buttle, Francis, "*Customer Relationship Management: Concept and Technologies*", New York: Routledge, 2006.
- [2] Buttle, F., "*Customer Relation Management ,Concepts and Technologies, Second Edition. In: s.l.:Elsevier Butterworth*", pp. 4-11. 2008.
- [3] Chaffey, Dave, "*E-Business and E-Commerce Management*", England: Pearson Education, 2009.
- [4] Kalakota, R. & M, R., 2001. *E-Bussiness 2.0 Roadmap for Success*. Massachusetts: Addison Wesley Longman INC.
- [5] Park, C.-H. & Kim, Y.-G, "*Framework of Dynamic CRM linking marketing with information strategy. Information Management & Computer Security*", 9(2), pp. 652-671, 2003.
- [6] Teti Wijayanti, Imam Azhari, "*Pengembangan Customer Relationship Management Berbasis Web*", 2013.

